



# UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

## FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Kampus UNKRIS Jatiwaringin, P.O.Box 7774/Jat.CM.  
Telp. (021) 8462229 -31 Langsung 84998529 Fax. : (021) 84998529  
J A K A R T A 13077

### LAPORAN NOTULENSI

#### HASIL PELAKSANAAN WEBINAR MENYELAMATKAN SITU DANAU, EMBUNG DAN WADUK (SDEW) UNTUK KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pelaksanaan Webinar Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana dengan tema "**Menyelamatkan Situ Danau, Embung dan Waduk (SDEW) untuk keberlanjutan Lingkungan**", pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 secara daring (*online*) dengan menggunakan media *Zoom Meeting*, bersama dengan kami sampaikan laporan sebagai berikut:

1. Rapat dibuka oleh Rektor Universitas Krisnadwipayana yaitu Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SIP., CIQaR yang kemudian dilanjutkan penyampaian *keynote speaker* oleh Ir. Dwi Hariyawan S, MA selaku staf ahli bidang Pengembangan dan Kawasan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pelaksanaan webinar dimoderatori oleh Ir. Reny Savitri, MT selaku Kaprodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana.
2. Narasumber terdiri dari tiga yaitu :
  - a. Agus Sutanto ST., M.Sc selaku Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. Ridwan Hariyadi, S.T., selaku Subkoordinator Pengendalian Pelaksanaan Bendungan dan Danau, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Ditjen SDA, Kemen PUPR; dan
  - c. Merry Morfosa, S.T. MT selaku Kepala Seksi Pola Ruang, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta
3. Agenda Webinar ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait termasuk peran akademisi dalam upaya menyelamatkan SDEW di kawasan perkotaan
4. Beberapa hal penting yang mengemuka dalam pelaksanaan webinar antara lain:
  - 1) **Keynote Speech : Ir Dwi Hariyawan S, MA. Selaku Staf Ahli bidang pengembangan kawasan kementerian ATR/BPN**
    - a. Penyelamatan SDEW tidak bisa hanya dengan penindakan atas masalah di lokasi eksisting tanpa merencanakan ruang secara komprehensif sejak dari hulu hingga hilirnya.
    - b. Perlindungan dan optimalisasi fungsi SDEW perlu dilakukan dalam rangka untuk melindungi fungsi SDEW dari pemanfaatan ruang yang tidak terkendali seperti penyusutan luas badan air, pendangkalan/sedimentasi SDEW, okupasi tepi badan air, tumbuhnya eceng gondok, maraknya keramba jaring apung (KJA), pencemaran badan air oleh limbah/sampah/pakan ikan; dan hancurnya keanekaragaman hayati endemik di SDEW sebagai dampak dari menurunnya kualitas air.
    - c. Upaya Pemerintah dalam menciptakan keseimbangan ekologi & tata air pada

SDEW dilakukan dengan menetapkan pembangunan 18 (delapan belas) waduk multiguna yang diharapkan dapat menambah pasokan air baku, serta pemulihan 4 (empat) Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis yakni DAS Asahan, DAS Ciliwung, DAS Cisadane, dan DAS Citarum sebagaimana yang tercantum dalam Major Project RPJMN 2020-2024

- d. Berdasarkan Perpres No. 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, peningkatan kuantitas/ketahanan air dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan konservasi melalui revitalisasi danau yang difokuskan pada 16 danau prioritas nasional .
- e. Dalam melakukan upaya pencegahan permasalahan tersebut, maka Kementerian ATR/BPN juga telah menyusun 1 (satu) Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya yakni Perpres Nomor 81/2014; 8 (delapan) Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR KSN yang di dalam deliniasi wilayahnya terdapat danau-danau prioritas nasional, misalnya Danau Limboto dalam KSN Danau Limboto, Danau Tondano dalam KSN Perkotaan Bimindo, Danau Batur dalam KSN Subak-Bali Landcape, dsb; serta 96 rancangan Instrumen Pengendalian (Insdal) pada 11 WS yang tersebar di Indonesia.
- f. Pengelolaan masing-masing SDEW perlu ditangani secara komprehensif serta melibatkan berbagai pihak dan bidang keilmuan

## 2) Narasumber 1 : Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- a. Perlindungan dan optimalisasi fungsi SDEW ini dilakukan melalui strategi pengendalian pemanfaatan ruang salah satunya dengan melakukan proses pendaftaran tanah kawasan SDEW agar jelas kepemilikannya dan memiliki kekuatan hukum atas deliniasi kawasan SDEW.
- b. Hal ini dilakukan karena seiring berkembangnya isu yang terjadi di sekitar SDEW yaitu terjadinya ketidak sesuaian/ pelanggaran pemanfaatan ruang, penurunan jumlah dan luasan SDEW akibat alih fungsi lahan, dan konflik yang terjadi pada sertipikat hak atas tanah.
- c. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka melindungi keberadaan SDEW adalah dengan memberikan sertifikasi hak atas tanah di sekitar SDEW serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruangnya melalui pemberian insentif dan disinsentif dan pengenaan sanksi di daerah sekitar SDEW. Pengendalian ini bertujuan untuk melindungi badan air dari gangguan (okupasi dan limbah pencemar) sehingga lingkup pengaturan kawasan dibuat sekitar kawasan SDEW.
- d. Kebijakan pengelolaan SDEW ini dilakukan dari bagian hulu hingga hilir antara lain :
  - Pada bagian hulu, dilakukan dengan pengembangan kawasan resapan air, rth, sumur resapan, pengelolaan sampah, limbah dan sedimentasi
  - Bagian tengah, dilakukan melalui peningkatan konservasi air pengendalian jarring apung, dan pengembangan wisata air sekaligus penghijauan sempadan badan air (50m) pengembangan wisata hijau tepi situ
  - Dan bagian hilir dilakukan dengan pengendalian banjir/daya rusak air, efisiensi dan efektivitas penggunaan air
- e. Terdapat 4 komponen utama dalam pengaturan pengendalian SDEW yaitu :
  - Kegiatan sebagai sumber dari penyebab perubahan kualitas air yang bersifat *point source*

- Media pengaliran air dari sumber ke badan air SDEW berupa drainase buatan atau alami
  - Sifat kegiatan terhadap pengaruh perubahan kualitas dan kuantitas air; serta
  - Dampak terhadap kondisi air dan badan air SDEW
- f. Total ada 43 sertifikat tanah SDEW yang telah diresmikan oleh kementerian ATR/BPN dari 2017 sampai dengan 2019.
- g. Pada tahun 2021 pemerintah telah menetapkan Perpres 60 tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas. Rencana aksi yang sudah dibuat ada 16 danau prioritas.
- h. Beberapa hal yang menjadi penting dalam melakukan legalisasi lahan SDEW salah satunya perlu penyamaan persepsi bahwa SDEW bisa disertipikatkan dan kesiapan dana untuk pembiayaan pendaftaran tanah untuk SDEW.

**3) Narasumber 2 : Subkoordinator Pengendalian Pelaksanaan Bendungan dan Danau, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Ditjen SDA, Kementerian PUPR**

- a. Terdapat lima aspek permasalahan SDA di wilayah sungai Ciliwung dan Cisadane yaitu :
- Terkait konservasi sumber daya air, adanya penggunaan lahan sempadan sumber air dan pengolahan lahan di daerah hulu yang mengabaikan konsep konservasi
  - Pendayagunaan sumber daya air seperti kerusakan jaringan irigasi dan penyediaan layanan air baku
  - Pengelolaan data dan informasi SDA belum terpadu, terkoordinasi antar instansi pengelola data, dan belum terintegrasi secara maksimal
  - Belum optimalnya peranan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan SDA
- b. Sudah ada upaya pengendalian banjir dari hulu-tengah-hilir salah satunya yang sedang dilaksanakan yaitu pembangunan 2 bendungan. Fungsi bendungan berupa bendungan kering dengan membuat penampungan di bagian hulu. Selanjutnya penanganan di bagian tengah juga sudah ada upaya penyodetan dari sungai ciliwung ke kali banjar kanal timur, dan bagian hilir dilakukan dengan upaya membangun pompa dan kolam retensi untuk mengendalikan banjir di daerah Jakarta. Beberapa revitaliasi yang sudah dikerjakan sampai saat ini yaitu di waduk pluit , waduk setiabudi, waduk rawa badak, waduk sunter, dan pintu manggarai.
- c. Skema pengendalian banjir secara komprehensif yang sudah dilakukan untuk saling berkoordinasi dengan instansi dan stake holder terkait. Salah satunya di DKI Jakarta yaitu normalisasi kali ciliwung dengan total yang akan dikerjakan adalah 39 km, on going 17 km sisanya 22 km akan dilaksanakan oleh pemda dki hal tersebut dilakukan sebagai upaya penanganan banjir di pantai muara
- d. Penetapan Garis Sempadan Sungai Ciliwung, saat ini telah ditetapkan melalui Kepmen PUPR No.238 tahun 2020 tentang Penetapan GSS pada ruas Sungai Ciliwung
- e. Fungsi sempadan adalah untuk parkir sementara air, disetiap sungai memiliki bantaran dan sempadan. Tujuan penetapan sempadan sungai dan pantai adalah agar tidak terganggu oleh aktivitas masyarakat di sekitar, untuk menjaga kelestarian sungai, membatasi daya rusak air, menjaga kelestarian ekosistem, dan menjaga kehidupan masyarakat

- f. Upaya pengelolaan SDA dilakukan dengan melakukan konservasi SDA upaya fisik sudah ada pembangunan di bagian hulu seperti pembangunan 2 bendungan untuk mengatasi banjir tengah dan hilir dan beberapa infrastruktur lainnya dibagian wilayah sungai cisadane
- g. Manfaat normalisasi sungai ciliwung adalah menormasiksi lebar ciliwung, dan memperkuat tanggul di sepanjang sisi kali ciliwung. Normalisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tampung air, agar pada saat hujan daya tampung di sungai ciliwung akan menjadi lebih besar sehingga dapat mengurangi banjir yang ada
- h. Perlu ada sinkronisasi antar stakeholder terkait baik dari pusat hingga daerah untuk mengurangi banjir di DKI Jakarta khususnya

**4) Narasumber 3 : Kepala Seksi Pola Ruang, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta**

- a. Daerah hilir di daerah DKI Jakarta harus dikolaborasi bersama, untuk penanganan di daerah hilir juga sudah ditangani oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta melalui pembangunan rehabilitasi sistem polder di 9 titik (polder muara angke, teluk gong, pulomas, dll), pembangunan waduk/situ/embung di 4 titik (waduk brigif, pondok ranggon, lebak bulus, dan wirajasa), serta revitalisasi kali di 2 titik lokasi (kali ciliwung, dan sodetan pantai muara).
- b. Upaya yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta saat ini adalah dengan mengatur kebijakan terkait pengintegrasian sistem tata air dengan wilayah hulu dan/atau daerah di sekitarnya, selain itu juga ada yang dikolaborasi bersama dengan masyarakat dan pihak swasta.
- c. Peningkatan kapasitas sungai/kali/saluran merupakan wewenang pemerintah pusat
- d. Prioritas pembebasan lahan saat ini berada di lima titik lokasi yaitu kali ciliwung, kali pesanggrahan, kali angke, kali sunter, dan kali jati kramat
- e. Fungsi waduk tidak hanya sebagai pengendali air tapi juga multifungsi tetapi untuk fungsi rekreasi dan usaha tapi dibatasi kegiatannya sehingga tidak mengganggu fungsi sempadannya. Beberapa penataan waduk yang tidak hanya memiliki fungsi sebagai pengendali tetap juga menjadi fungsi rekreasi antara lain waduk sunter, dan waduk pondok ranggon.
- f. Rasio badan air di DKI Jakarta seharusnya memiliki status 5 % dari luas wilayah DKI Jakarta, namun saat ini masih belum mencapai angka tersebut maka masih dilakukan upaya agar sesuai dengan angka lima persen.
- g. Sudah ada pengaturan insentif dan disinsentif yang diberikan ke masyarakat dan pihak swasta. Sebagai contoh pada penataan kawasan srenseng sawah, swasta yang akan membantu pemerintah untuk pengendalian banjir maka akan diberikan insentif. Namun pemberian insentif tersebut juga masih dalam pembahasan rumusan di pemerintah daerah
- h. Penataan kawasan waduk brigif juga masih dalam pembebasan lahan, akan dibuat sebagai ruang publik. Pemanfaatan ruang di daerah sekitar SDEW tersebut juga akan diatur dalam RDTR melalui ketentuan zonasinya

Demikian kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

# DOKUMENTASI

Keterangan : **Narasumber 1**  
**Bapak Agus Sutanto S.T, M.Sc**  
**Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN**

## KEDUDUKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

### A. POSISI STRATEGIS PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan **TERTIB TATA RUANG**.
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan **muatan Rencana Tata Ruang**, sehingga pengendalian dilaksanakan untuk **mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR**
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas instrumen **penencegahan dan penegakan hukum** terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

### E. SKEMA KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDEW

**Keterangan:**

- 1 **Bagian Hulu**  
 Pengembangan kws Resapan, Pengelolaan Sampah, Limbah
- 2 **Bagian Hulu**  
 Peningkatan Konservasi Air Pengendalian jaring apung, dan pengembangan wisata air
- 3 **Sempadan Situ**  
 Penghijauan sempadan badan air (50m) Pengembangan wisata hijau tepi situ
- 4 **Bagian Hilir**  
 Pengendalian Banjir/daya rusak air, Efisiensi dan efektivitas penggunaan air



# WEBINAR NASIONAL 2021

" MENYELAMATKAN SITU, DANAU, EMBUNG DAN  
UNTUK KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN "

30 Oktober 2021



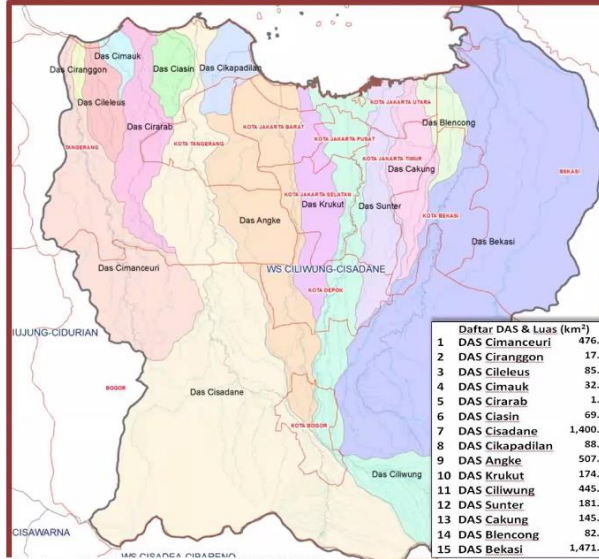
Agus Sutanto | Dir. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Keterangan

: **Narasumber 2**  
**Bapak Ridwan Hariyadi, S.T.,**

## GAMBARAN UMUM

### DESKRIPSI WS



Sumber: PerMen PUPR No.04/PRT/2015

BBWS CILIWUNG CISADANE  
**PUPR**  
SIGAP MEMBANGUN

Status WS : LINTAS  
PROVINSI  
Kode WS : 02.05.A2

Luas WS : 5569,06 Km<sup>2</sup>  
Jml DAS : 15 DAS  
(Permen PUPR4/PRT/M/2015)

LUAS DAS TERBESAR  
DAS Bekasi: 1.471 Km<sup>2</sup>,  
DAS Cidasane: 1.400 Km<sup>2</sup>,  
DAS Cimanceuri: 477 Km<sup>2</sup>,  
DAS Ciliwung: 446 Km<sup>2</sup>,

Terdiri dari :  
3 Prov: DKI Jakarta, Banten &  
Jawa Barat ,

13 Kabupaten/kota  
Jumlah penduduk eksisting  
(2020): 31.212.960 jiwa  
Kepadatan penduduk: 5,605  
jiwa/km<sup>2</sup>

Dasar hukum kewenangan  
pengelolaan SDA:

1. UU No. 23/2014 ttg  
Pemerintah Daerah;
2. UU No. 17/2019 ttg SDA;
3. Permen PUPR No. 04/ 2015  
ttg Kriteria & Penetapan  
Wilayah Sungai



Ridwan Hariyadi

Zoom Meeting | You are viewing Ridwan Hariyadi's screen | View Options

Recording

**SISTEM PENGENDALIAN BANJIR DKI JAKARTA**

TOTAL PANJANG PANTAI & MENDAK SUNGAI YANG KREKES: 46,3 KM  
 TOTAL TITIK PENGENDALIAN: 23,9 PUSAT  
 BENCANA PENGENDALIAN: 13,74 KM CULAS DAN PUPR (2,75 KM Di Gedung Raha, 7,27 KM Di Rawa Sadak, 2,72 KM Di Pantai DKI JAKARTA)

KEPERINGATAN:  
 Q1: 0 (tidak)  
 Q2: 0 (tidak)  
 Q3: 0 (tidak)

Ridwan Hariyadi

Unmute | Start Video | Participants: 257 | Chat | Share Screen | Record | Reactions | Leave

10:47 AM 10/30/2021

Zoom Meeting | You are viewing Ridwan Hariyadi's screen | View Options

Recording

**KONSERVASI SUMBER DAYA AIR**  
**DASAR HUKUM PENGATURAN SEMPADAN SUNGAI**

Permen PU No. 28 Tahun 2015  
 Tentang  
 Penetapan Garis Sempadan Sungai dan  
 Garis sempadan danau

**Pasal 7**  
 Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

**Pasal 8**  
 Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

**Pasal 11**  
 Garis sempadan mata air, ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

**Pasal 12 Ayat (1)**  
 Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

**BBWS CILIWUNG GISADANE**  
**PUPR**  
 SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Tujuan Penetapan Sempadan Sungai dan Pantai

1. Fungsi sungai tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
2. Meningkatkan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan menjaga kelestarian fungsi sungai;
3. Membatasi daya rusak air sungai;
4. kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Menjaga kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam;
6. alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
7. alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Ridwan Hariyadi

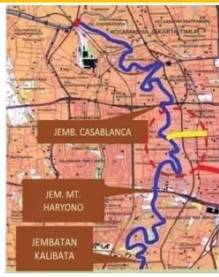
Unmute | Start Video | Participants: 247 | Chat | Share Screen | Record | Reactions | Leave

10:54 AM 10/30/2021

Zoom Meeting    You are viewing Ridwan Hariyadi's screen    View Options

Recording

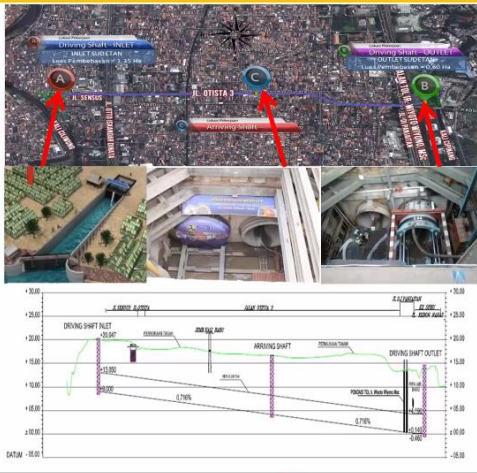
## 2. SUDETAN KALI CILIWUNG KE BANJIR KANAL TIMUR (BKT) (TA. 2013 – 2017)



**DATA TEKNIS**  
 Panjang Sudetan : 1,27 Km  
 Jumlah Pipa : 2 Buah  
 Diameter Dalam Pipa : 3,5 m  
 Diameter Luar Pipa : 4,05 m  
 Tipe Alat Bor : EPB (2 unit)

**MANFAAT**  
 Mengalirkan sebagian debit banjir Kali Ciliwung sebesar 60 m<sup>3</sup>/det.

**LOKASI**  
 DKI Jakarta



Ridwan Hariyadi

Unmute    Start Video    Participants 247    Chat    Share Screen    Record    Reactions    Leave

11:05 AM  
10/30/2021

**Keterangan : Narasumber 1**  
**Ibu Merry Morfosa, S.T. MT**

Zoom Meeting    You are viewing DCKTRP Merry Morfosa's screen    View Options

Recording



**DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN  
 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**




evaluasirk2@gmail.com    rta.go.id

DCKTRP Merry Morfosa

Unmute    Start Video    Participants 238    Chat    Share Screen    Record    Reactions    Leave

11:17 AM  
10/30/2021

Zoom Meeting | You are viewing DCKTRP Merry Morfosa's screen | View Options

Recording

Sumber: Paparan DSDA Provinsi DKI Jakarta

### 2. FAKTA & ISU PERMASALAHAN PENGENDALIAN BANJIR

Permasalahan banjir di DKI Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Luas wilayah DKI Jakarta yang semakin sempit akibat pembangunan gedung-gedung bertingkat.
- Perubahan tata ruang yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.
- Penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah.
- Saluran air yang tidak lancar akibat sampah dan limbah.

Jakarta menghadapi 3 Iron Bangir: Air, Banjir, dan Kemiskinan.

Capaian target rencana pembangunan DKI Jakarta 2025: 100% kawasan permukiman layak huni.

Tahun	Luas Wilayah (Ha)	Luas Kawasan Perkotaan (Ha)	Luas Kawasan Pedesaan (Ha)	Luas Kawasan Perkotaan (Ha)	Luas Kawasan Pedesaan (Ha)	Luas Kawasan Perkotaan (Ha)	Luas Kawasan Pedesaan (Ha)
2010	660.000	300.000	360.000	300.000	60.000	300.000	60.000
2015	660.000	300.000	360.000	300.000	60.000	300.000	60.000
2020	660.000	300.000	360.000	300.000	60.000	300.000	60.000
2025	660.000	300.000	360.000	300.000	60.000	300.000	60.000

Sumber Data: BPS, Bappenas, BIRIG, Open Data Jakarta

MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENYERAPAN AIR

- Menyusun RTRW dan RTRM (Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Wilayah) yang memperhatikan aspek lingkungan.
- Membangun Sistem Resapan dan Drainase Terpadu.
- Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota Green & Blue).

PERENCANAAN WILAYAH/REKONSTRUKSI DASAR

- Rehabilitasi Kali Duri.
- Pembangunan dan Rehabilitasi Polder.
- Program Kali Duri.
- Pembangunan Bangkai Buntu.

Jakarta

## DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DCKTRP Merry Morfosa

Unmute | Start Video | Participants: 237 | Chat | Share Screen | Record | Reactions | Leave

11:18 AM 10/30/2021

Zoom Meeting | You are viewing DCKTRP Merry Morfosa's screen | View Options

Recording

Sumber: Paparan DSDA Provinsi DKI Jakarta

### LOKASI PEMBANGUNAN WADUK/ EMBUNG

NO	LOKASI	LUAS	TUJUAN
1	Waduk Brigif	10,33 Ha	Mengurangi debit banjir Kali Krukut sebesar 23,17 m <sup>3</sup> /s (reduksi 29%)
2	Waduk Pondok Ranggon	11,55 Ha	Mengurangi debit banjir Kali Sunter sebesar (reduksi 20%)
3	Waduk Labak Bulus	3,83 Ha	Mengurangi debit banjir Kali Crogol sebesar 9,85 m <sup>3</sup> /s (reduksi 11%)
4	Embung Wirajasa	0,81 Ha	Mengurangi debit Kali Sunter dan sebagai daerah resapan air sebagai ruang publik

Keterangan

- Kali Sungai
- Genangan Akibat Hijau Hulu
- Lokasi Waduk

Response closed PDFs

Your last Acrobat Reader session ended abruptly. Click Restore to reopen the PDFs from the last session.

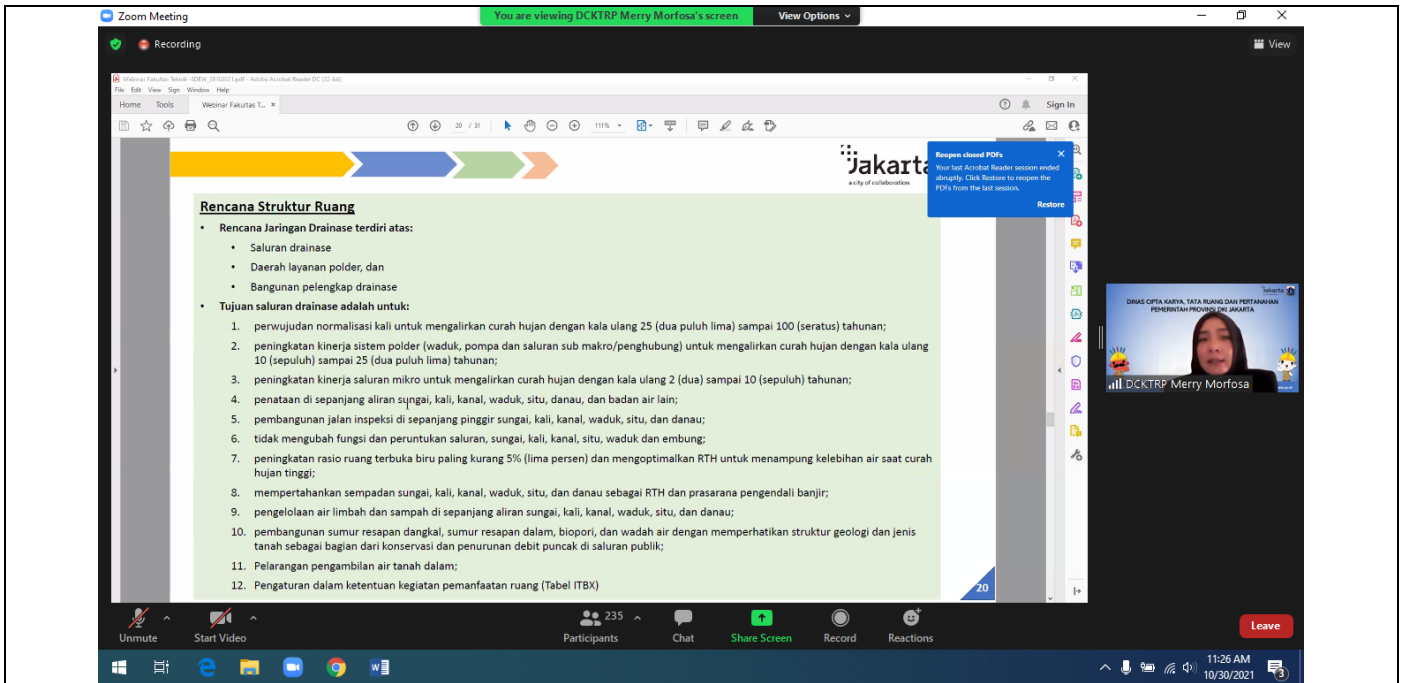
Restore

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DCKTRP Merry Morfosa

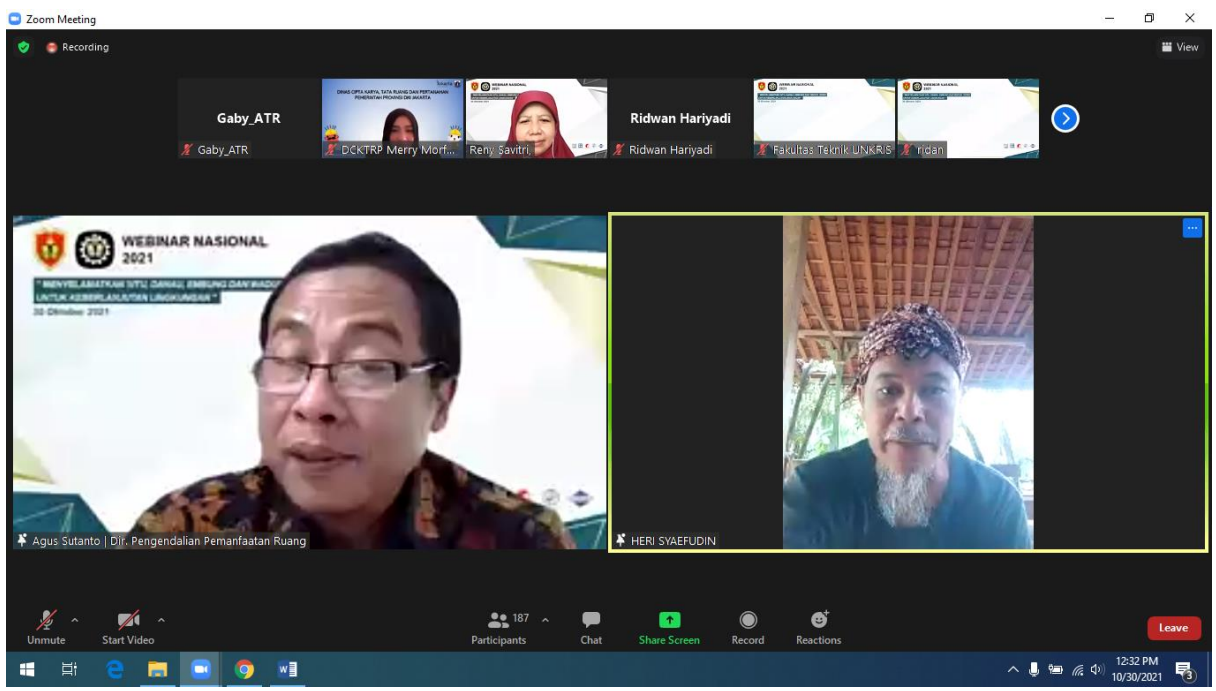
Unmute | Start Video | Participants: 239 | Chat | Share Screen | Record | Reactions | Leave

11:22 AM 10/30/2021



## Diskusi :









## HASIL DISKUSI

NO	MASUKAN/PERTANYAAN	JAWABAN NARASUMBER
<b>1.</b>	<b>Karsono, Mahasiswa Sipil Unkris</b>	
	<p>a. Sudah sejauh mana koordinasi dengan provinsi yang lain seperti bogor? Terkait penyebab terjadinya banjir</p> <p>b. Penebangan pohon yang ada di hulu dan pembangunan gedung yang ada di hulu? Apakah itu berpengaruh terjadinya banjir di DKI Jakarta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengacu pada perpres 60 tahun 2020, sudah ada tim koordinasinya., pemerintah pusat yg menjadi ketua yaitu Kementerian ATR/BPN. Pembahasan isu dilakukan bersama lintas sektor dan pusat yang menetapkan</li> <li>• Ada porsi pembagian tugas kewajiban di masing-masing daerah tapi dinaungi oleh kementerian atr/bpn yaitu Badan Koordinasi PMO Jabodetabekpunjur(Ketua Tim)</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Andri, Kanwil BPN DKI</b>	
	<p>Pertanahan di DKI saat ini tidak bisa menetapkan jika tidak ada rekomendasi dari pusat. Di BPN perlu diberikan data mana saja lokasi yang ada SDEW agar diterapkan penanganan, sehingga memerlukan arahan khususnya dari Ditjen Pengendalian di Kementerian ATR/BPN. Terkait dengan usulan water front city, kendala yang terjadi adalah dari sisi pendaftaran tanah di kawasan sempadannya</p> <p>Apakah ada solusi untuk mengantisipasi tersebut? Untuk revisi rtrw , perlu dicarikan solusinya</p>	<p>Pak Agus :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan 3R memang saat ini masih banyak kendala,, syarat 3R harus dipenuhi lebih dulu baru diberikan hak atas tanahnya</li> <li>• Perlu diberikan ketentuan pada pemohon dan dibuat aturan apa yang boleh dan tidak boleh, kalau melanggar maka sanksinya HGU akan dicabut</li> <li>• PP no 18 tahun 2021 , kebijakan di pusat memberikan hak pada kawasan sensitive asalkan <i>responsibility</i> itu dipatuhi.</li> <li>• Yang perlu dilakukan adalah melakukan seleksi pada calon pemegang hak nya. Serifikat tanah ini diberikan berupak HGU atau hak pakai. Apabila pemda tidak diberikan pada hak, maka pemda harus mengantisipasi pengalihan penguasaan tanah atau pembelian dari pemerintah daerah</li> <li>• Hak diberikan tapi disertai dengan konep 3R</li> </ul>
		<p>Bu Merry</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah ada RDTR online maka dengan itu para pengajuan permohonan bisa melihat ketentuannya tersebut sebenarnya</li> <li>• Dalam aturan RDTR DKI Jakarta untuk pengendalian banjir dan pemanfaatan sempadan sudah diatur dengan jelas dan teukur</li> <li>• Pada saat melakukan sosialisasi perlu ada sosialisasi pada masyarakat terkait aturan pembatasan sempadan sungainya.</li> </ul>

NO	MASUKAN/PERTANYAAN	JAWABAN NARASUMBER
		<p>Bapak Ridwan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu ada koordinasi secara intens</li> <li>• Terkait dengan tata ruang dan hak atas tanah , pada saat dilapangan maslaah legalitas ini</li> <li>• Sudah ada upaya dari pemerintah yaitu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dimulai dari pusat untuk merumuskan pengaturan dalam mengatasi permasalahan banjir</li> </ul>
<b>3.</b>	<b>Satriani, Mahasiswa UGM</b>	
	<p>Saat ini permukiman sangat berkembang di pemanfaatan sempadan danau. Salah satunya pada PT. Valey yang merupakan industri pengelolaan tambang nikel dan hal itu menjadi bangkitan permukiman di sekitar kawasan danau matano.</p> <p>Mohon arahan dan solusi dari sisi sosial, ekonomi, terkait penguasaan tanah dari PT. Valey, masyarakat dll?</p>	<p>Pak Agus :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Danau matano menjadi salah satu lokasi prioritas di Perpres 60 tahun 2021. Dalam rencana nya masih ada pemanfaatan izin untuk permukiman namun terbatas</li> <li>• Namun memang di rencana tata ruang belum ada kejelasan terkait intensitasnya berapa dll. Ketidakjelasan rencana tata ruang itulah yang membatasi upaya pengendalian sebenarnya</li> <li>• Perpres no 60 tahun 2021 akan mendorong rencana tata ruang harus jelas, terukur, dan tidak multi interpretasi/ multi tafsir. Selama rencana tata ruang belum jelas dll maka pengendalian blm bisa mengatasi permasalahan tersebut</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>Heri Syaefudin, Komunitas Masyarakat Situ Pengasinan</b>	
	<p>Saya mendedikasikan tanah saya sebagai ruang terbuka hijau di depok, tapi sejauh mana pemerintah dapat mengawasi untuk agar tidak terjadi alih fungsi ?</p> <p>Perlu ada koordinasi di tempat kami, untuk memberikan hak ekologi, agar sempadan situ menjadi bagian dari koridor ekologis</p>	<p>Pak Agus :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan tindakan yang bapak lakukan maka pada saat sertifikat diberikan , maka sertifikat nanti akan keluar <i>responsibility</i> nya,</li> <li>• Kementerian ATR/BPN sangat menghargai kepemilikan yang ada di masyarakat</li> <li>• Sudah ada aturan terkait Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah yaitu PP 43/2021</li> <li>• Ketidaksesuaian terbagi menjadi 2 kategori yaitu keterlanjuran dan pelanggaran. Keterlanjuran ini memiliki solusi bahwa jika daya tampung dan dakung belum terlampaui makanya rtr harus direvisi harus diakomodir. Atau jika tidak mau direvisi atau penyesuaian terkait izin dan penggantian yang layak</li> </ul>

NO	MASUKAN/PERTANYAAN	JAWABAN NARASUMBER
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP 43 merupakan alarm jika menetapkan rencana tata ruang maka perlu memperhatikan hak masyarakat. Pemerintah harus merevisi atau membeli hak tersebut. antara hak dan konsensi</li> <li>• Dalam pemberian hak atas tanah, perlu ada kejelasan sejarah asal usul pembelian tanah untuk administasi pertanahan lalu diusulkan ke kantor pertanahan</li> <li>• Perlu ada komitmen bersama dari berbagai pihak</li> </ul>